

PENGELOLAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN (PNPM-MP) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN NANGGALO

Dartanto

Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP

Abstract

This research is motivated by PNPM-Mandiri Perkotaan project who has the weakness management in district Nanggalo. The purpose of this study to get informations about: (1) The planning of PNPM Mandiri Perkotaan project to effort the poor community empowerment in district Nanggalo, (2) The implementation of PNPM Mandiri Perkotaan project to effort the poor community empowerment, and (3) The controlling and evaluation of PNPM Mandiri perkotaan project to effort the poor community empowerment. The research methode is used descriptive form, the population of the study is all the managers of PNPM Mandiri Perkotaan in district Nanggalo which amounts 29 people. Instrument research using questionnaire with a Likert scale models. As for testing the validity of the instrument by using the formula product moment Pearson, and reability test performed by the instrument internal consistency by using Cronbach Alpha. Test results are valid and reliable questionnaire. The datas were processed using the formula data. The result of the study showed that management of PNPM Mandiri Perkotaan project in district Nanggalo in planning, implementation and controlling and evaluation is in the well category, with average score of 3,95.

Kata kunci : Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan. Pembangunan erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam

suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005: 111).

Sebagaimana yang kita ketahui, Tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan apabila kemiskinan yang masih ada di Negara kita dapat dikurangi. Kemiskinan saat ini merupakan prioritas masalah yang sedang dihadapi, dipecahkan dan dihadapi oleh pemerintah. Kemiskinan dari tahun ke tahun terus meningkat, bisa dilihat dari sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencari modal usaha, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kepada perekonomian masyarakat kecil baik dikota maupun didesa. Disamping itu, terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, hal ini dapat kita buktikan dengan tingginya perbedaan pendapatan antar daerah. Oleh karena itu perlu di kaji bagaimana jalan keluarnya untuk menekan tingginya perbedaan pendapatan antara daerah yang satu dengan yang lainnya, sehingga laju perekonomian antar daerah tidak begitu mencolok perbedaannya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji bagaimana proses terbentuknya sebuah kelompok usaha bersama masyarakat miskin yang ada dalam program pengentasan kemiskinan. Pemerintah pusat dan daerah telah memikirkan model kelompok usaha bersama yang dapat menjadikan masyarakat miskin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Berbagai cara untuk memberdayakan penduduk miskin harus dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Sudah banyak upaya yang dilakukan selama ini dalam berbagai bentuk program pengentasan kemiskinan, contohnya; Program kompensasi (bantuan langsung pangan, voucher pelayanan minimum kesehatan dan pendidikan), namun belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih tetap tinggi.. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut perlu adanya program yang efektif, efisien, terpadu dan berorientasi pada kemandirian yang berkelanjutan. Menurut Sajogyo (1997) bahwa, “ pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama yang dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian.”

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Dulu program ini bernama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan berganti nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2008. Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP dilakukan dengan memberdayakan masyarakat miskin.

Kota Padang, sudah memiliki dan melaksanakan model kelompok usaha bersama masyarakat miskin yakni; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sejak namanya masih P2KP yaitu tahun 2006. Kecamatan Nanggalo merupakan salah satu dari kecamatan di kota Padang yang telah melaksanakan PNPM-MP. Teknik atau prosedur pelaksanaan telah dituangkan dalam buku panduan pelaksanaan PNPM-MP, salah satunya adalah sasaran kegiatan harus jelas dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, program yang dilaksanakan harus dapat membantu masyarakat keluar dari cengkeraman kemiskinan.

Oleh karena itu perlu ada pengelola yang membantu masyarakat merealisasikan semua program yang direncanakan agar pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM-MP) dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Adapun tujuan yang terdapat dalam penelitian di Kecamatan Nanggalo pada 3 Kelurahan yakni Surau Gadang, Kurao Pagang dan Gurun Laweh ini adalah untuk mendeskripsikan tentang : 1) Perencanaan program PNPM-MP dalam usaha memberdayakan masyarakat miskin di Kecamatan Nanggalo, 2) Pelaksanaan program PNPM-MP dalam usaha memberdayakan masyarakat miskin di Kecamatan Nanggalo, 3) Pengawasan dan evaluasi dari program PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Wardoyo (1980:41) (<http://id.shvoong.com/writing-and-peaking/presenting/2108155-pengertian>) : “pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Harsoyo (1977:121) (<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian>) : pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Pengelolaan PNPM adalah kegiatan pengelolaan yang dibentuk dengan mempertimbangkan input kegiatan yang terdiri dari aspek keuangan, aspek tenaga, aspek teknologi, aspek nilai-nilai terkait, aspek dukungan dan aspek tujuan. Pengelolaan sebuah organisasi direfleksikan dalam suatu struktur organisasi, dimana bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing yang saling berkaitan dan saling membutuhkan.

Sepanjang yang kita ketahui, permasalahan kemiskinan yang ada di setiap daerah membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Chambers (1987:141) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan sebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan keterasingan (*isolation*). Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan

orang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi, sosial maupun politik. Untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sejak tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dapat berjalan kembali dan berkelanjutan nantinya.

PNPM Mandiri melakukan pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program pembangunan yang berbasis masyarakat dengan menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan, dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal, mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif, menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis dan melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Berdasarkan buku Pedoman Umum PNPM Mandiri (2007;11) mengartikan bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri sendiri menuju keadaan yang lebih baik, dan mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompok, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Upaya memberdayakan penduduk miskin sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Kita menyadari masyarakat yang mandiri tidak mungkin dapat diwujudkan secara cepat, namun bisa dibina dengan berbagai kegiatan seperti; pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan saja, tetapi dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dapat mendorong upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sehingga, program yang disusun memiliki korelasi dengan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan adanya PNPM Mandiri ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat miskin dan kesempatan kerja secara mandiri akan terbuka luas.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan program PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (1990) penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola program PNPM-MP mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan di Kecamatan Nanggalo yang berjumlah 29 Orang. Populasi menurut Sudjana (1984) adalah "Totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran kualitatif atau kuantitatif dari karakteristik atau ciri-ciri mengenai sekumpulan objek yang ingin dipelajari sifat-sifatnya". Karena jumlah sampel tidak begitu banyak, maka semua anggota dijadikan sumber data, jadi penelitian ini adalah penelitian populasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan mengajukan angket. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya seperti data-data mengenai PNPM-MP. Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola program PNPM-MP yang ada di Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan yang terpilih sebagai populasi / sampel.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian adalah angket (kuisioner) dengan model skala Likert dengan 5 (Lima) alternative jawaban yaitu : Selalu (SL), Sering (SR), Kadang - kadang (KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Responden memilih jawaban dengan memberikan tanda check (✓) untuk masing-masing pilihan jawabannya. Data penelitian ini dianalisis dengan gambaran secara kuantitatif secara rata-rata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo seperti yang telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya, yang meliputi (1) data perencanaan program PNPM-Mandiri Perkotaan di Kecamatan Nanggalo yang indikatornya (a) proses, (b) aspek, (c) waktu, (d) siapa. (2) data pelaksanaan Program PNPM-Mandiri Perkotaan di Kecamatan Nanggalo yang indikatornya (a) proses, (b) aspek, (c) waktu, (d) siapa. (3) data pengawasan dan evaluasi program PNPM-Mandiri Perkotaan di Kecamatan Nanggalo yang indikatornya (a) aspek, (b) waktu, (c) teknik, (d) siapa, (d) tindak lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan perencanaan program PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo masuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata 3,81. Hasil yang baik ini menunjukkan bahwa antara pengelola PNPM-MP dengan masyarakat dalam membuat perencanaan program PNPM-MP, telah menggunakan aspek yang benar, ketepatan waktu dan bagi / untuk siapa

program ini dibuat. Tetapi pada tahapan proses dalam perencanaan antara pengelola PNPM-MP dengan masyarakat masih dalam kategori cukup.

Menurut Wilson (dalam Sumaryadi, 2005) tentang empat tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap awal berupa penyadaran (*awakening*), tahap kedua sudah mengarah kepada pemahaman (*understanding*), tahap ketiga sudah menuju pada ranah pemanfaatan (*harnessing*) dan tahap yang terakhir yaitu menjadikan proses-proses dalam pemberdayaan masyarakat sebagai suatu kebiasaan (*using*). Tahap pembiasaan adalah tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya, karena setiap hasil atau keluaran yang didapatkan adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan sudah seharusnya pengelola PNPM melibatkan secara penuh peran masyarakat miskin sebagai pelaku dan penerima manfaat program.

Menurut Soerjono Seokanto (1990:35), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan dari berbagai hasil yang dicapai. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan untuk mendukung terjalannya kerjasama antara masyarakat dengan pengelola PNPM seperti adanya publikasi dan penyebaran informasi. Bentuk penyebarluasan informasi ini bisa berupa melalui media, baik cetak maupun elektronik dan internet. Dengan upaya yang seperti itu diharapkan proses perencanaan dapat berjalan lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PNPM-MP skor rata-rata adalah 3,98. Artinya perencanaan program PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo sudah berjalan dengan baik, baik dilihat dari proses, aspek, waktu, dan siapa dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan.

Berdasarkan pada observasi awal di Kecamatan Nanggalo, peneliti dapat menjabarkan beberapa keunggulan dari pelaksanaan program ini yang meliputi, *pertama*, Mensosialisasikan kembali proses pelaksanaan program yang sama yang bernuansa nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, *kedua* Pembangunan sarana umum seperti; jalan, bangunan posyandu, saluran air bersih yang diatur dalam program PNPM-MP telah dapat memecahkan masalah pembangunan dalam aspek fisik, *ketiga*, Masyarakat membayar dana pinjaman bergulir sesuai waktu yang telah ditentukan oleh UPK Kecamatan Nanggalo, *keempat*, UPK (Unit Pengelola Kegiatan), fasilitator PNPM – MP dan masyarakat memiliki koordinasi yang erat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program PNPM-MP.

Dari hasil kuisioner terdapat beberapa masalah yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo. Beberapa kendala tersebut antara lain : Jarangnya ditemukan proses administrasi yang sudah layak di UPK BKM di Kecamatan Nanggalo.

- BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) terbagi menjadi beberapa divisi sesuai dengan kegiatan tridaya (aspek lingkungan, aspek sosial, aspek fisik) dan tidak ada spesifik untuk mengorganisir relawan.
- Masih ada ditemukan masyarakat yang lambat dalam pembayaran pinjaman bergulir.
- Sebahagian kecil pengelola masih ada yang bekerja kurang efektif dan efisien.

Beberapa permasalahan tersebut tentu saja dapat menyebabkan kurang baiknya pelaksanaan program PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo periode tahun 2011. Untuk itu perlu perbaikan dan peningkatan diberbagai sektor supaya maksimalnya pelaksanaan program PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo di tahun 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi program PNPM-MP skor rata-rata adalah 4,06. Artinya pengawasan dan evaluasi program PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo sudah berjalan dengan baik, baik dilihat dari aspek, waktu, teknik, siapa, dan tindak lanjut dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan.

Menurut Lester dan Stiward dalam Widodo (2000:126), evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan dilaksanakan agar dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Untuk itu diharapkan program PNPM-MP akan menjadi program yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.

UNDP (2002) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan selektif yang mencoba mengkaji perkembangan dan pencapaian suatu hasil secara sistematis dan objektif. Evaluasi harus dilakukan berulang dan dilaksanakan berdasarkan lingkup dan kedalaman yang berbeda pada beberapa tahapan waktu untuk menilai pencapaian hasil.

Secara umum Pengelolaan program PNPM-MP di Kecamatan Nanggalo sudah baik dengan skor rata-rata 3,95. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi program PNPM-MP telah dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain, keadaan ini akan mewujudkan masyarakat “Berdaya” dan “Mandiri”, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program PNPM Mandiri Perkotaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : Perencanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Nanggalo baik dengan skor rata-rata 3,81, Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Nanggalo baik dengan skor rata-rata 3,98, Pengawas dan evaluasi program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan baik dengan skor rata-rata 4,06.

Secara umum pengelolaan program PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Nanggalo baik dengan skor rata-rata 3,95.

SARAN-SARAN

Diharapkan kepada pengelola PNPM melibatkan secara penuh peran masyarakat miskin sebagai pelaku dan penerima manfaat program. Dengan upaya yang seperti itu diharapkan proses perencanaan dapat berjalan lebih baik. Dalam mekanisme pelaksanaan Program PNPM-MP yang ada di Kecamatan Nanggalo, semestinya pelaku PNPM-MP baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan, serta masyarakat penerima manfaat harus lebih konsisten pada ketentuan yang mengaturnya sesuai dengan prosedur dan pedoman umum PNPM-Mandiri, sehingga dapat mewujudkan Kecamatan Nanggalo yang sejahtera, mandiri dan mampu berdaya saing. Dalam penerapan penanggulangan kemiskinan melalui Program PNPM-MP harus ditingkatkan sosialisasinya serta menyadarkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam program.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 1990. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta Rineka Cipta.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Sajogyo, 1997. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Kompas 17 November 1997.
- Soekanto, Soerjono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 385.
- Sudjana. 1984. *Metode Statistik*. Bandung :Tarsita.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama
- UNDP, 2002, *Handbook on Monitoring and Evaluating for Result* , New York: United Nation Development Programme
- Widodo, Joko.2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang. Banyumedia.
- Buku Panduan Umum PNPM Mandiri 2007
- PNPM Mandiri Kota Padang, Kecamatan Nanggalo, 2011
- <http://www.pnpm-mandiri.com>
- <http://www.p2kp.org>
- <http://www.pnpm-online.org>
- <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian>
- <http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9170503858168046243>